



LAPORAN LKIP TAHUN 2023



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuknya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato Tahun 2023.

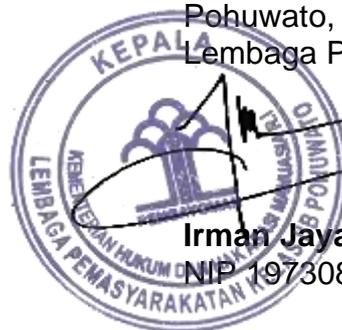
Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Pohuwato, 26 Juni 2023 Kepala
Lembaga Pemasarakatan



Irman Jaya

NIP. 197308161996031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Lingkungan Hidup atas penyelenggaraan Badan Lingkungan Hidup. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato.

Pengukuran pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 26 sasaran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian Kinerja Periode tahun 2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala dan staf Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait Berdasarkan hasil realisasi anggaran tahun 2023 Lapas Pohuwato mencapai 98.48% dari total anggaran sebesar Rp. 7,085,146,944.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato untuk Perjanjian kinerja yang akan datang yaitu tahun 2024 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama indikator pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG	1
A. UMUM.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. ASPEK STRATEGIS.....	5
E. ISU STRATEGIS.....	8
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN JANJI KINERJA	
1. RENCANA STRATEGIS	12
2. PERJANJIAN KINERJA	15
3. ALOKASI ANGGARAN	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KERJA.....	19
2. REALISASI ANGGARAN	55
3. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	56
4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	58
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	63
2. Saran	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014. Lapas Kelas IIB Pohuwato merupakan Lapas yang berada diujung barat Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Lapas yang mulai beroperasi pada tahun 2015 ini terkenal dengan Lapas Industri dan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kabupaten Pohuwato, serta bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan Narapidana/anak didik yakni, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana, mengelolhasil kerja, melakukan bimbingan sosial / kerohanian Narapidana / Anak Didik, melakukan pembinaan Narapidana / Anak Didik / Tahanan, melakukan pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib, serta melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan LKJIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Puhwato mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III puhwato menyelenggarakan fungsi:

1. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
2. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan

TABEL I.I

Tugas dan Fungsi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / anak didik	Melakukan pembinaan narapidana / anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan social / kerohanian narapidana / anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

<p align="center">Bidang Pembinaan Narapidana</p>	<p>Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi isi dikjari narapidana; memberikan bimbingan pasyarakatatan; Mengurus kesehatan dan perawatan narapidana / anak didik</p>
<p align="center">Bidang Kegiatan Kerja</p>	<p>Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas saranakerja; mengelola hasil kerja</p>
<p align="center">Bidang Administrasi Kamtib</p>	<p>Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian Tugas pengamanan; Menerima laporan harian dan berita acara Dari satuan pengaman yang bertugas</p>
<p align="center">Kesatuan Pengamanan Lapas</p>	<p>Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; Melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.</p>

1. STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIB Pohuwato sebanyak 72 (Tujuh puluh Dua) orang yang terdiri dari :

- 1 Orang Kepala Lembaga Pasyarakatatan
- 12 Orang Pejabat Struktural (8 Orang Eselon V dan 4 Orang Eselon IV)

- 1 Orang Bendahara Pengeluaran
- 3 Orang Pengelola Keuangan
- 1 Orang Pengelola BMN
- 1 Orang Pengelola Administrasib Pimpinan
- 1 Orang Penatausahaan
- 2 Orang Pengadministrasi Umum
- 2 Orang Staf Kamtib
- 10 Orang Staf Binapigiatja
- 2 Orang JFT Perawat
- 4 Orang Komandan Jaga
- 32 Orang Petugas/Anggota Jaga

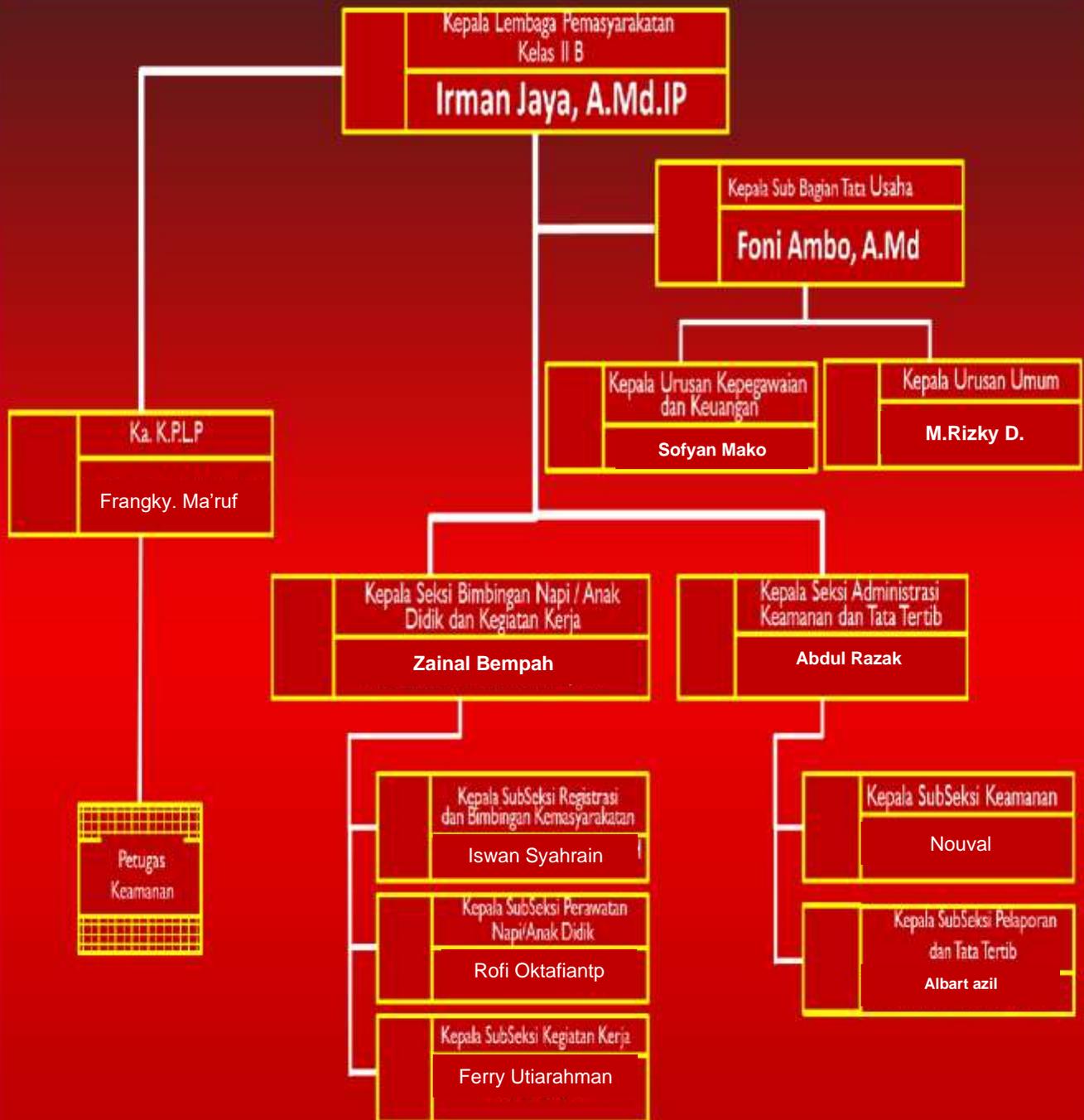
Pejabat Struktural pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pohuwato :

TABEL I.II
Nama Pejabat

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT	PANGKAT/ GOL
1	KALAPAS	IRMAN JAYA,	PENATA T.K I (III /d)
2	KASUBAG TATA USAHA	FONI AMBO	PENATA MUDA T.K I (III/b)
3	KA. KPLP	FRANGKY G. MA'RUF	PENATA MUDA T.K I (III/b)
4	KASI BINAPIGIATJA	ZAINAL BEMPAH	PENATA MUDA T.K I (III/b)
5	KASIMINKAMTIB	ABDUL RAZAK SULEMAN	PENATA (III/c)
6	KAUR KEPEGKU	SOFYAN MAKO	PENATA MUDA T.K I (III/b)
7	KAUR UMUM	M.RIZKY D. UMAR	PENATA MUDA T.K I (III/b)
8	KASUBSI KEAMANAN	NOUVAL MOHAMMAD	PENATA MUDA T.K I (III/b)
9	KASUBSI PELAPORAN	ALBART AZIS	PENATA (III/c)
10	KASUBSI REGISTRASI	ISWAN SYAHRAIN	PENATA MUDA T.K I (III/b)
11	KASUBSI PERAWATAN	ROFI OKTAFIANTO	PENATA MUDA T.K I (III/b)
12	KASUBSI KEGIATAN KERJA	FERI UTIARAHMAN	PENATA MUDA (III/a)



STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS II B POHUWATO



A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi dan perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato.

Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

B. ASPEK STRATEGIS

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PR.01.01-10 TAHUN 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut :

A. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan;
- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
- Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

C. TUJUAN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan

Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;
- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
- Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;
- Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan

D. ISU STRATEGIS

Isu Strategis sering ditemui pada seluruh Seksi yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato yaitu:

1. Jauhnya Akses dari Pohuwato ke kota sehingga menyulitkan pemenuhan sarana dan prasarana;
2. Pembayaran BAMA Untuk WBP Sampai Akhir Tahun Mengalami Perubahan Karena Jumlah WBP Yang Masuk Kedalam Lapas, Belum Bisa Dipastikan Di Akhir Tahun serta adanya pemindahan narapidana baik dari Lapas Kelas IIB pohuwato maupun Lapas Gorontalo;
4. Kurangnya Anggota Regu Pengamanan;
5. Kurangnya Pengetahuan Anggota Regu Pengamanan Dalam Menggunakan Alat Pengamanan;
6. Tidak Tersedianya Sarana AC Diruangan Server SDP;
7. Alat Medis Di Ruangan Klinik Lapas Tidak Memadai;
8. Dokter Ahli Tidak Ada;

9. Tidak terdapat mesin kulkas untuk menyimpan obat-obatan;
10. Kursi roda sudah rusak;
11. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Keamanan, Berupa Tabung Pemadam Api;
12. Alat Kemanan Sudah Banyak Tidak Layak Digunakan;dan
13. Tidak Adanya Alat Komunikasi (HT) Untuk setiap Regu Pengamanan.

TABEL I.III
Permasalahan dan Capaian

NO	PERMASALAHAN	CAPAIAN
1	<p>SUBBAGIAN TATA USAHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jauhnya Akses dari Pohuwato ke kota sehingga menyulitkan pemenuhan sarana dan prasarana. • Pembayaran BAMA Untuk WBP Sampai Akhir Tahun Mengalami Perubahan Karena Jumlah WBP Yang Masuk Kedalam Lapas, Belum Bisa Dipastikan Di Akhir Tahun serta adanya pemindahan narapidana baik dari Lapas Kelas IIB pohuwato maupun Lapas Gorontalo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai Terpenuhi Sampai Akhir Tahun. • Realisasi IKPA Mencapai 98.48 % pada semester II • Belanja Oprasional Perkantoran Sampai Semester II, Berjalan Dengan Baik. • PNPB Kemandirian Sampai Dengan Semester II, Mencapai 5.500.000 Dari Hasil Perkebunan Asimilasi. • Pencatatan Barang Milik Negara Yang Ditrasfer Oleh Kantor Wilayah Sudah Dicatat Dalam Aplikasi Sakti.
2	<p>KPLP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Anggota Regu Pengamanan • Kurangnya Pengetahuan Anggota Regu Pengamanan Dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya Keadaan Lapas Aman Kondusif • Tercapainya Pencegahan HALINAR Di Dalam Lapas. • Pelaksanaan deklarasi zero halinar di lapas Pohuwato

	Menggunakan Alat Pengamanan.	
3	SEKSI BINAPIGIATJA <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Tersedianya Sarana AC Diruangan Server SDP. • Alat Medis Di Ruangan Klinik Lapas Tidak Memadai. • Dokter Ahli Tidak Ada. • Tidak terdapat mesin kulkas untuk menyimpan obat-obatan • Kursi roda sudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Program Kemandirian Untuk WBP. • Meningkatnya PNPB Dari Hasil Perkebunan WBP Asimilasi. • Sistem Rujuk WBP Berjalan Dengan Baik. • Skrining Penyakit Menular Dan HIV Terlaksana. • Terlaksananya Program Reintegrasi (PB,CB,CMB,Asimilasi) Bagi Narapidana • Pengendalian virus covid-19 berjalan dengan baik melalui program vaksinasi • Terlaksananya Program IntegrasiBagi Narapidana. • Terlaksananya Sistem Sell Service Bagi Narapidana. • Terpenuhinya Fasilitas Sidang Online Bagi Tahanan. • Adanya transferan mobil Ambulance dari DITJENPAS
4	SEKSI ADMINKAMTIB <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana Dan Prasarana Keamanan, Berupa Tabung Pemadam Api. • Alat Kemanan Sudah Banyak Tidak Layak Digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksanakanya Kegiatan Pengeledahan Kamar Hunian WBP, Rutin Setiap Bulan. • Terpenuhinya Laporan – Laporan Bulanan. • Sistem Keluar Masuk WBP Terlaksana Dengan SOP Terbaik.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Adanya Alat Komunikasi (HT) Untuk setiap Regu Pengamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer Masuk HT, Gembok dan Metal Detector dari kanwil dan DITJENPAS
--	--	--

E. Sistemasikan Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Menjelaskan secara ringkas profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato, latar belakang, visi dan misi, Stuktur Organisasi, dan Menjelaskan masalah yang dihadapi serta pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisis saat capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Kesimpulan dan Saran.

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato.

Target kinerja pada tingkat rencana strategis akan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran perencanaan kinerja, di dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun rincian perencanaan kinerja terlihat pada tabel Perencanaan Kinerja Lapas Kelas IIB Pohuwato sebagai berikut yang merupakan turunan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2020 s/d 2024:

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan di lingkungan UPT	Menurunnya Persentase Residivis diwilayah

<p>PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	
<p>Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan</p>
<p>Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas</p>
<p>Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Pemasyarakatan pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>
<p>Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis TI pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Persentase data tahanan dan narapidana yang terverifikasi pada Satuan Kerja PAS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>
<p>Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Pemasyarakatan khususnya</p>	<p>Jumlah pelaksanaan bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasyarakatan</p>

dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama

Meningkatnya tata kelola pelayanan Tahanan

Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar pada Satuan Kerja PAS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Nilai-Nilai Dasar : **P A S T I**

PROFESIONAL Yaitu mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui Kerjasama.

AKUNTABEL Yaitu Mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas baik dari segi proses maupun hasil

SINERGI Yaitu Mampu bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat dan berkualitas

TRANSPARAN Yaitu Mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INOVATIF Yaitu mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Untuk penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato adalah untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- b) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
- c) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d) Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
- e) Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.
- f) Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
- g) Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
- h) Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- i) Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government).

Dari Penjelasan Diatas Kita Mendapatkan Sasaran penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. sasaran LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Stakeholder

- Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
- Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif Proses Internal

- Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan.

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- Meningkatkan kualitas pengawasan internal masyarakat
- Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial

c. Perspektif Pengembangan Organisasi

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas Masyarakat
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- Optimalisasi proses masyarakat berbasis teknologi informasi.

d. Perspektif Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada UPT Masyarakat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Masyarakat yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

TABEL II.I
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA TAHUN 2023
1	Meningkatnya pelayanan Perawatan/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit, Menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar
		Persentase tahanan narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
		Persentase tahanan/ Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
		Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		Persentase tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan narapidana resiko tinggi	Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak remisi

		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadisaar, patuh dan disiplin
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu

		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
		Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
		Jumlah layanan perkantoran
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Sumber Data : Renstra Kemenkumham RI 2020-2024

C. ALOKASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato sesuai dengan DIPA Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato T.A. 2023 sebesar Rp. 6.325.969.000 Dengan perincian sebagai berikut :

TABEL II.II
Alokasi Anggaran

Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
Rp. 3.313.418.000	Rp. 2.953.016.000	Rp. 59.535.000	Rp. 6.325.969.000

BAB III

ANKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Pohuwato, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato dengan perincian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KERJA TAHUN 2023	TARGET 2023	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan Perawatan/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit, Menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75 %	133 %
		Persentase tahanan narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93 %	108 %
		Persentase tahanan/ Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	96 %	104 %
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70 %	143 %
		Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	125 %
		Persentase tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	80 %	125 %
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah	70 %	143 %

		virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25 %	
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65 %	154 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak remisi	98 %	102 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	80 %	125 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	80 %	125 %
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15 %	667 %
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	28 %	116 %
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	149 %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	125 %
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	143 %
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80 %	125 %

		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	70 %	143 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terpenuhinya data dan penigkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah layanan perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	5 Unit
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16 Unit	17 Unit

Berikut akan disampaikan penjelasan capaian dari masing-masing indikator kinerja. A yaitu Apabila semakin tinggi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

IKK ini memiliki target ditahun ini sebesar 75%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase pemenuhan layanan terhadap narapidana yang memperoleh pelayanan makanan sesuai standar di hitung dari narapidana yang memperoleh pemenuhan makanan sesuai standar dibagi dengan jumlah WBP, rinciannya sebagai berikut :

TABEL III.II

Jumlah layanan dan Respon Layanan

JUMLAH NAPI	JUMLAH NARAPIDANA		
	YANG MEMPEROLEH PELAYANAN SESUAI STANDAR	YANG TIDAK MEMPEROLEH PELAYANAN SESUAI STANDAR	YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN
225	300	0	0

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	75%	100%	133%

memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			
---	--	--	--

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 133 \%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 133% atau 189 Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato 100 % telah mendapatkan pemenuhan layanan makanan sesuai standar. Sehingga narapidana yang memperoleh pelayanan pemenuhan makanan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato memenuhi realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 75 % pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 133%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 2 :

Persentase tahanan narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

IKK ini memiliki target sebesar 93 %. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase jumlah Narapidana yang boleh mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar jumlah narapidana yang tidak mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. rinciannya pada Tabel III.IV :

TABEL III.IV

Jumlah narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dan Jumlah napi yang tidak mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai standar

JUMLAH NARAPIDANA YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	JUMLAH NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	PERSENTASE
279 ORANG	300 ORANG	-	100 %

TABEL III.V : Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	93%	100%	108%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{93\%} \times 100\% = \%$$

$$= 108\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 108 % atau 137 orang yang berhak mendapatkan Layanan Kesehatan semuanya telah mendapatkan Layanan kesehatan. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 93 % pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 103%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 3 :

Persentase tahanan/ Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal

IKK ini memiliki target pada tahun 2023 sebesar **96 %**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Presentase jumlah tahanan /narapidana perempuan yang mendapatkan akses layanan kesehatan dan jumlah tahanan /narapidana perempuan yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan Di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato tidak memiliki tahanan/Narapidana Perempuan, oleh karena itu realisasi pelaksanaan indikator kinerja adalah 100 %

TABEL III.VII : Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	96%	100%	104%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$
$$\frac{100\%}{96\%} \times 100\%$$

$$= 104\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **104 %** Hal ini disebabkan karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato tidak memiliki tahanan/Narapidana perempuan.

Indikator 4 :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

IKK ini memiliki target di tahun 2023 sebesar **70%**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani berbanding dengan seluruh warga binaan yang mengalami gangguan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato tidak memiliki Warga Binaan yang

mengalami gangguan mental, oleh karena itu capaian realisasi pada indikator kinerja adalah 100 %

TABEL III.IX : Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Warga Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.	70 %	100%	143%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = \%$$

$$= 143\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 143% atau target warga binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani telah tercapai.

Indikator 5 :

Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

IKK ini memiliki target di Tahun ini sebesar 80%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Jumlah WBP lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Jumlah WBP Lansia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato seperti pada TABEL III.X.

TABEL III.X

**Presentase jumlah WBP Yang Memperoleh Hak Pelatihan Vokasi
Besertifikasi**

JUMLAH WBP LANSIA	JUMLAH WBP YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH WBP YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	PRESENTASE
4	4	-	100%

TABEL III.XI : Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase jumlah WBP Yang Memperoleh Hak Pelatihan Vokasi Besertifikasi	65%	100%	125%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{65\%} \times 100\% = \%$$

$$= 125\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 125% atau jumlah WBP Lansia yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato selama tahun 2023 telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 80% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 125%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 6

Pesentase tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 80%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung :

- Jumlah WBP Disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Jumlah WBP Disabilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato.:

**TABEL III.XII
PRESENTASE PENGADUAN YANG DI TINDAK LANJUTI SESUAI
STANDAR**

JUMLAH WBP DISABILITAS	JUMLAH WBP YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH WBP YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	PRESENTASE
1	1	-	100%

TABEL III.XIII : Perbandingan Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N
PRESENTASE PELAYANAN KESEHATAN WBP DISABILITASI SESUAI STANDAR	80%	100%	125%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{75\%} \times 100\% = \%$$

$$= 125\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 125% atau jumlah WBP Disabilitas yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato selama tahun 2023 telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 80% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 125%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 7

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 70%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular di cegah dengan presentase jumlah penyakit menular, Berikut rinciannya :

TABEL III.XIV

Presentase Gangguan Kamtib yang dapat di cegah

JUMLAH WBP YANG TERKENA PENYAKIT MENULAR TB/HIV AIDS	JUMLAH WBP YANG BERHASIL SEMBUH	JUMLAH WBP YANG TIDAK SEMBUH	PRESENTASE
1	1	-	100%

TABEL III.XV : Perbandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Penanganan Penyakit Menular yang dapat di cegah	70%	100%	143%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = \%$$

$$= 143\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **143%** atau WBP yang terkena penyakit menular HIV AIDS/TB pada Tahun 2023 dapat tertangani dan berhasil sembuh. Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 70% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 143%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 8

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar **25%**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Presentase jumlah WBP yang mengalami perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban terhadap jumlah Narapidana Naarkoba yang berada di dalam Lapas. Berikut rinciannya;

TABEL III.XVI

Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban

JUMLAH WBP KASUS NARKOBA	JUMLAH WBP YANG MENGALAMI PERUBAHAN KUALITAS HIDUP	JUMLAH WBP YANG TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN KUALITAS HIDUP	PRESENTASE
32	32	-	100%

Tabel III.XVII : PEMBANDING TARGET DAN REALISASI

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban	25%	100%	400%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{25\%} \times 100\% = \%$$

$$= 400\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **400%** atau Seluruh Narapidana Narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato telah mengalami perubahan kualitas hidup. Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 400%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 25% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 400%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 9

Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

IKK ini memiliki target ditahun ini sebesar 65%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat

memuaskan pada instrument penilaain kepribadian di hitung dari narapidana yang memperoleh nilai baik pada instrument penilaian kepribadian dibagi dengan jumlah WBP, rinciannya sebagai berikut

TABEL III.XVIII

TABEL III.II

Jumlah Narapidana yang memperoleh Nilai Baik

JUMLAH NAPI	JUMLAH NARAPIDANA		
	YANG MEMPEROLEH NILAI BAIK	YANG MEMPEROLEH NILAI CUKUP	YANG MEMPEROLEH NILAI BURUK
131	120	11	0

Tabel III.XIX : Pemanding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100%	141%

$$\frac{REALISASI}{TAARGET} X 100\% = \%$$

$$\frac{100}{65\%} X 100\% = \%$$

$$= 141\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 141% atau 131 Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato 100% mendapatkan nilai baik. Sehingga narapidana yang memperoleh pembinaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato memenuhi realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 65 % pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 141%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 10

Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak remisi

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 98%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Persentase jumlah Narapidana yang boleh mendapatkan remisi dan jumlah narapidana yang tidak mendapatkan hak remisi. Berikut rinciannya :

TABEL III.XX

Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi dan Jumlah napi yang tidak mendapatkan hak remisi

JUMLAH NARAPIDANA YANG BERHAK MENDAPATKAN REMISI	JUMLAH NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN REMISI	JUMLAH NARAPIDANA YANG TIDAK MENDAPATKAN REMISI	PERSENTASE
180 ORANG	180 ORANG	-	100 %

TABEL III.XXI : Pembeding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Narapidana Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Narapidana Sesuai Standar	98%	100%	109 %

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{98\%} \times 100\% = \%$$

$$= 109\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 109 % atau 120 orang yang berhak mendapatkan remisi semuanya telah mendapatkan remisi. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 98 % pada

Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 109%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 11

Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar **80%**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Presentase jumlah napi yang mendapatkan hak integrasi dan jumlah napi yang berhak mendapatkan integrasi.

TABEL III.XXII

Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Jumlah Napi yang berhak mendapatkan Integrasi	Jumlah total napi yang mendapatkan integrasi	Presentase
52	48	100%

TABEL III.XXIII : Pembandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Jumlah Narapidana yang Mnedapatkan Hak Integrasi	80%	100%	125%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} X 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{80\%} X 100\% = \%$$

$$= 125\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **125%** atau sebanyak 48 orang napi yang berhak mendapatkan hak integrasi

semuanya telah mendapatkan hak integrasi baik CB, CMB, PB maupun

—
—

asimilasi Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 80% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 133%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 12

Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar **80%**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah napi yang mendapatkan pendidikan berbanding dengan seluruh warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato.

TABEL III.XXIV

Jumlah Napi yang mendapatkan Pendidikan

Jumlah warga binaan Pemasyarakatan	Jumlah Napi yang mendapatkan Pendidikan	%
180	180	100%

TABEL III.XXV : Perbandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Warga Binaan yang mendapatkan Pendidikan	80%	100%	125%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = \%$$

$$= 125\%$$

Berdasarkan data tersebut di atas maka capaian indikator ini adalah 80% atau target warga binaan yang mendapatkan pendidikan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Pohnato baik pendidikan agama berupa baca tulis

—
—

Al-Quran maupun buta aksara mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 80% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 125%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 13

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar **15%**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Jumlah Narapidana yang mengalami resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin berbanding dengan jumlah Narapidana resiko tinggi. Berikut rinciannya :

TABEL III.XXVI

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG BERESIKO TINGGI	JUMLAH NAPI YANG BERESIKO TINGGI YANG BERUBAH PERILAKUNYA MNEJADI SADAR PATUH DAN DISIPLIN	%
1	1	100%

TABEL III.XXVII : Pembeding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAPAIN
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	100%	667%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{15\%} \times 100\% = \%$$

$$= 667\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **667%** atau jumlah narapidana yang beresiko tinggi yang di targetkan di periode tahun 2023 telah terpenuhi, Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 667%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 60% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 167%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 14

Presentase Narapidana Yang Memperoleh Hak Pelatihan Vokasi Besertifikasi

IKK ini memiliki target di Tahun ini sebesar 28%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Jumlah WBP didalam Lembaga Pemasyarakatan yang mendapatkan pelatihan dan Jumlah WBP yang mendapatkan pelatihan vokasi besertifikasi.

TABEL III.XXVIII

Presentase jumlah WBP Yang Memperoleh Hak Pelatihan Vokasi Besertifikasi

JUMLAH WBP YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	JUMLAH WBP YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DAN BERSERTIFIKASI	JUMLAH WBP YANG TIDAK MENDAPATKAN PELATIHAN	PRESENTASE
60	60	0	100%

TABEL III.XXIX : Pembandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase jumlah WBP Yang Memperoleh Hak Pelatihan Vokasi Besertifikasi	28%	100%	357%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{28\%} \times 100\% = \%$$

$$= 357\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 357% atau jumlah WBP yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato selama tahun 2023 mendapatkan pelatihan bersertifikasi sebanyak 60 orang. Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 357%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 28% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 357%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 15

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 67%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Jumlah WBP yang bekerja dan Produktif berbanding dengan jumlah WBP yang bekerja tapi tidak Produktif yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato Berikut rinciannya :

TABEL III.XXVIII

PRESENTASE NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF

NO	JUMLAH WBP YANG BEKERJA	JUMLAH WBP YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF	PRESENTASE CAPAIAN
1	8	8	100%

TABEL III.XXIX : Pembandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAPAIN
PRESENTASE NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF	67%	100%	141%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{67\%} \times 100\% = \%$$

$$= 141\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 141% atau Seluruh narapidana yang bekerja lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato merupakan narapidana yang produktif sehingga PNBPN pada tahun 2023 untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato dapat terpenuhi di periode tahun 2023, Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 75% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 141%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 16

PRESENTASE PENGADUAN YANG DI TINDAK LANJUTI SESUAI STANDAR

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 80%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Jumlah pengaduan pihak eksternal (pengunjung maupun pihak terkait dengan lapas) terhadap pelayanan yang di berikan oleh LAPAS.. Berikut rinciannya :

TABEL III.XXVIII
PRESENTASE PENGADUAN YANG DI TINDAK LANJUTI SESUAI
STANDAR

JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH LAYANAN		PRESENTASE
	PENGADUAN YANG TERTANGANI	PENGADUAN YANG TIDAK TERTANGANI	
-	-	-	100%

TABEL III.XXIX : Pembanding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAPAIN
PRESENTASE PENGADUAN YANG DI TINDAK LANJUTI SESUAI STANDAR	80%	100%	125%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = \%$$

$$= 125\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **125%** atau Pengaduan terhadap layanan yang diberikan oleh Lapas Kelas IIB Puhwato sudah memenuhi standar sehingga belum ada pengaduan yang di berikan oleh pihak eksternal kepada lapas. Sehinga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 80% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 125%, sehinga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 17

Presentase Gangguan Kamtib yang dapat di cegah

IKK ini memiliki target di Tahun 2021 sebesar 60%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Presentase Gangguan kamtib yang dapat di cegah dengan presentase gangguan kamtib yang tidak dapat di tangani, Berikut rinciannya :

TABEL III.XXVIII

Presentase Gangguan Kamtib yang dapat di cegah

Jumlah Gangguan Kamtib	JUMLAH LAYANAN		PRESENTASE
	<i>Gangguan Kamtib yang dapat dicegah</i>	<i>Gangguan Kamtib yang tidak dapat dicegah</i>	
-	-	-	100%

TABEL III.XXIX : Pembeding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Gangguan Kamtib yang dapat di cegah	70%	100%	143%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = \%$$

$$= 143\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 143% atau Semua gangguan kamtib yang terjadi selama Tahun 2023 dapat dicegah. SeHINGA dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi

100%. untuk target indikator ini adalah sebesar 70% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 143%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 18

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar **80%**. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Presentase jumlah WBP yang melakukan gangguan kamtib yang ada terhadap kepatuhan disiplin terhadap tata tertib yang diterapkan oleh Lapas. Berikut rinciannya

TABEL III.XXX

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Jumlah narapidana yang melakukan Gangguan Kamtib	JUMLAH LAYANAN		PRESENTASE
	<i>Jumlah Narapidana yang patuh</i>	<i>Jumlah narapidana yang tidak patuh</i>	
-	-	-	100%

TABEL III.XXXI : Pembeding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = \%$$

$$= 125\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah **125%** atau WBP yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib yang diberikan oleh lapas atas gangguan kamtib yang ada. Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 80% pada Tahun anggaran 2021. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 133%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 19

PRESENTASE PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA GANGGUAN KAMTIB SECARA TUNTAS

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 70%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung Jumlah Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Narapidana yang menjadi peserta pelatihan Kemandirian dan jumlah Narapidana yang mendapatkan pembinaan, latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi. Berikut rinciannya :

Tabel III.XXXII

PRESENTASE PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA GANGGUAN KAMTIB SECARA TUNTAS

NO	PERIODE	JUMLAH GANGGUAN KAMTIB	GANNGUAN KAMTIB YANG DAPAT DI PULIHKAN	CAPAIAN %
1.	Tahun 2023	-	-	100%

Tabel III.XXXIII : Pembanding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PRESENTASE PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA GANGGUAN KAMTIB SECARA TUNTAS	70%	100%	143%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = \%$$

$$= 143\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 143% atau Jumlah Gangguan kamtib yang terjadi selama Tahun 2023 dapat di tangani dan pemulihan atas gangguan kamtib dapat dituntaskan Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 143%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 70% pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 143%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

INDIKATOR 20

TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN UPT PEMASYARAKATAN DAN PELAPORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU

IKK ini memiliki target di tahun 2023 sebesar 1 Layanan atau 1 Dokumen. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara terpenuhinya dokumen rencana kerja anggaran (RKA K/L) lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato pada tahun anggaran 2023.

Selama tahun 2023, dokumen rencana kerja anggaran telah terpenuhi yakni dengan terbitnya RKA K/L untuk tahun 2023, dengan adanya dokumen RKA K/L maka indicator rencana kerja anggaran telah terpenuhi. Bila dilihat dari presentase capaian:

TABEL III.XXXIV : Pembeding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN UPT PEMASYARAKATAN DAN PELAPORAN YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = \%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 100% atau di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato tersusunya dokumen anggaran sudah sesuai, aknutabel dan tepat waktu dalam penyusunan dokumen anggaran. SeHINGA dihitng dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 1 Layanan pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 100%, seHINGA capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

INDIKATOR 21

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGELOLAAN BMN DAN KERUMAH TANGGAAN

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 1 Layanan atau 1 Dokumen. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah tersusunya laporan pengelolaan BMN dengan baik. Laporan Pengelolaan BMN terdiri dari Catatan Atas Laporan BMN dan Laporan RKBMN Dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato laporan CAL BMN dan RKBMN telah terpenuhi dengan akuntabel dan tepat waktu. Oleh karena itu untuk indicator Pengelolaan BMN telah terpenuhi dengan baik.

TABEL III.XXIX : Pembandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGELOLAAN BMN DAN KERUMAH TANGGAAN	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = \%$$

$$= 100\%$$

INDIKATOR 22

TERPENUHINYA DATA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMASYARAKATAN

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 1 Layanan atau 1 Dokumen. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan tersedianya Data pegawai Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato serta data pelatihan maupun data peningkatan kompetensi pegawai selama Tahun 2023. Data pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato pada khususnya maupun seluruh pegawai Kemenkumham semua telah terupdate di aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu data pegawai untuk lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato telah terpenuhi.

Untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti pelatihan maupun pendidikan di lakukan secara merata dan setiap bulan dilaporkan kepada kantor wilayah pegawai yang telah mengikuti diklat maupun yang belum mengikuti diklat. Dan apabila yang belum mengikuti diklat akan segera di ajukan pada gelombang pelatihan atau diklat berikutnya. Oleh karena itu untuk peningkatan kompetensi pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato telah terpenuhi.

TABEL III.XXIX : Pembandingan target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TERPENUHINYA DATA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMASYARAKATAN	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = \%$$

$$= 100\%$$

Indikator 23

JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN

IKK ini memiliki target di semester I sebesar 1 Layanan atau 1 Dokumen. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara terpenuhinya dokumen layanan perkantoran di antaranya Pembayaran tunjangan Pegawai dan Penyelenggaraan Operasional pemeliharaan kantor.

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan selama Tahun 2023 telah di lakukan, dimana setiap bulan para pegawai menerima haknya masing-masing tanpa ada penundaan gaji, tunjangan kinerja, dan uang makan. Oleh karena itu untuk pembayaran Gaji dan tunjangan telah terpenuhi.

b. Penyelenggaraan Operasional pemeliharaan Kantor

Dalam penyelenggaraan Operasional pemeliharaan Kantor diantaranya Biaya perbaikan Peralatan kantor, Pemeliharaan gedung dan bangunan, Pemeliharaan kendaraan dinas, Langganan daya listrik dan jasa serta keperluan sehari-hari kantor semua telah terpenuhi. Oleh karena itu untuk Penyelenggaraan operasional pemeliharaan kantor telah terpenuhi.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka untuk capaian indikator layanan perkantoran berdasarkan table yaitu:

TABEL III.XXIX : Pembeding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{1 \text{ layanan}}{1 \text{ layanan}} \times 100\% = \%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator ini adalah 100% atau di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato seluruh layanan perkantoran telah terpenuhi. Sehingga dihitung dengan menggunakan persen mencapai realisasi 100%. Dan untuk target indikator ini adalah sebesar 1 Layanan pada Tahun anggaran 2023. Dengan perhitungan target dan realisasi indikator ini mencapai 100%, sehingga capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator 24

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 5 Unit . Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan terpenuhinya belanja modal perangkat pengolah data komunikasi dan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada tahun 2023 Dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato telah melakukan pembelian sejumlah perangkat data komunikasi diantaranya;

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	LAPTOP	2 UNIT	TEREALISASI
2	SCAN	1 UNIT	TEREALISASI
3	AC	2 UNIT	TEREALISASI

TABEL III.XXIX : Pemanding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
JUMLAH PERANGKAT DATA KOMUNIKASI	5 UNIT	5 UNIT	100%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{17 \text{ UNIT}}{17 \text{ UNIT}} \times 100\% = \%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka jumlah perangkat data dan komunikasi telah terpenuhi di tahun 2023 yakni sebanyak 17 unit perangkat data dan komunikasi telah dilakukan pembelian dan dalam kondisi baik.

Indikator 25

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

IKK ini memiliki target di Tahun 2023 sebesar 17 Unit . Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan terpenuhinya belanja modal Peralatan dan fasilitas Perkantoran pada tahun 2023.

Dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato telah melakukan pembelian sejumlah peralatan fasilitas perkantoran diantaranya

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	KURSI KERJA	16 UNIT	TEREALISASI
2	LEMARI ARSIP	1 UNIT	TEREALISASI

TABEL III.XXIX : Pemanding target dan realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
JUMLAH PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	17 UNIT	17 UNIT	100%

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = \%$$

$$\frac{25 \text{ UNIT}}{25 \text{ UNIT}} \times 100\% = \%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan data tersebut diatas maka jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran telah terpenuhi di tahun 2023 yakni sebanyak 25 unit Kursi kerja telah dilakukan pembelian dan dalam kondisi baik.

1. REALISASI ANGGARAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 6,759,618,000,-. Dan kemudian terdapat revisi 11 (lima) kali, di revisi pertama samapi dengan revisi kesebelas terdapat perubahan DIPA dikarenakan refocusing dan penambahan jumlah pegawai serta untuk anggaran Bahan Makanan Napi terdapat penambahan. sehingga DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato saat ini sebesar Rp. 7,001,092,000,- Dengan perincian sebaga berikut :

TABEL III.XXXII

Realisasi anggaran semester I Tahun 2023

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Serapan (%)
1	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2,235,827,000	2,215,240,960	20,586,040	99.08 %
2	Operasi	71,096,000	70,953,673	142,327	99.80 %

	Bidang Keamanan				
3	Layanan Perkantoran	4,707,529,000	4,619,382,340	88,146,660	98.13 %
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	18,851,000	18,727,680	123,320	99.35 %
5	Layanan Umum	14,800,000	14,659,275	140,725	99.05 %
6	Layanan SDM	43,788,000	43,787,922	78	100.00
7	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	61,512,000	61,382,049	129,951	99.79 %
8	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	19,980,000	19,973,371	6,629	99.97 %
	T O T A L	7,173,383,000	7,064,107,270	109,275,730	98.48 %

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran sejumlah Rp. 7,173,383,000, dan realisasi anggaran sebesar 7,064,107,270 atau 98,48%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai di lembaga masyarakat kelas IIB Pohuwato, selain itu dengan adanya penambahan jumlah Napi yang membuat anggaran Belanja Bahan Makanan meningkat.

2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran Selama tahun 2023 dihasilkan melalui 2 variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).

1. Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerja

secara mandiri menggunakan aplikasi SMART DJA. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato kinerja anggaran dalam kategori baik

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

E-PERFORMANCE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit anda. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato melalui aplikasi E-Performance pengukuran kinerja termasuk dalam kategori Baik hal ini berdasarkan hasil pengukuran penilaian kinerja pada aplikasi.

NO			TARGET	CAPAIAN
----	--	--	--------	---------

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA TAHUN 2023		
1	Meningkatnya pelayanan Perawatan/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit, Menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75 %	133 %
		Persentase tahanan narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93 %	108 %
		Persentase tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	96 %	104 %
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70 %	143 %
		Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	125 %
		Persentase tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	80 %	125 %
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)	70 %	143 %

		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25 %	400 %
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan narapidana resiko tinggi	Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65 %	141 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak remisi	98 %	109 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	80 %	170 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	80 %	125 %
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15 %	667 %
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	28 %	357 %
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	141 %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	125 %
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	143 %
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80 %	125 %

		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	70 %	143 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah layanan perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	5 Unit
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	16 Unit	17 Unit

2. E-Monev Bapenas

Aplikasi E-Monev Bapenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/Lembaga). Aplikasi E-monev juga digunakan untuk pemantauan

pelaksanaan RKP (melalui output-output yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga).

Di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-Monev Bapenas termasuk dalam kategori baik.



perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Bagi Pemerintah Pusat, RKP menjadi acuan oleh K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah :

- 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

- 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- 7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Prioritas Nasional, Kementerian Hukum dan Ham pada umumnya, dan Unit Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato pada khususnya berusaha mendukung tercapainya kegiatan Prioritas Nasional melalui Rencana strategis dan Perjanjian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato diantaranya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan Kepada Warga Binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato.'

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. LKIP Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato

tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024.

Secara garis besar capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pohnohato pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL III.XXXIII
Capaian kinerja di Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA TAHUN 2023	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan Perawatan/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit, Menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75 %	133 %
		Persentase tahanan narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93 %	108 %
		Persentase tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal	96 %	104 %
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70 %	143 %
		Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	125 %
		Persentase tahanan/Narapidana/Anak	80 %	125 %

		berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)	70 %	143 %
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25 %	400 %
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan narapidana resiko tinggi	Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65 %	141 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak remisi	98 %	106 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	80 %	172 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	80 %	125 %
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15 %	667 %
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi besertifikasi	28 %	357 %
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	141 %
3		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	125 %

	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	143 %
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80 %	125 %
		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	70 %	143 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terpenuhinya data dan penigkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah layanan perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	25 Unit	25 Unit

		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	17 Unit	17 Unit
--	--	--	---------	---------

Dari hasil capaian tersebut, maka realisasi kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato di tahun 2023 semuanya telah memenuhi target sesuai dengan indicator kinerja Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato, dari Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato di tahun 2023 dapat di kategorikan dengan nilai baik.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato di tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato ,Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Khususnya Divisi Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato maupun Pihak Lainnya.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun Sistem pengendalian Intern Pemerintah pada Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pohuwato.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses Pemasyarakatan secara optimal.

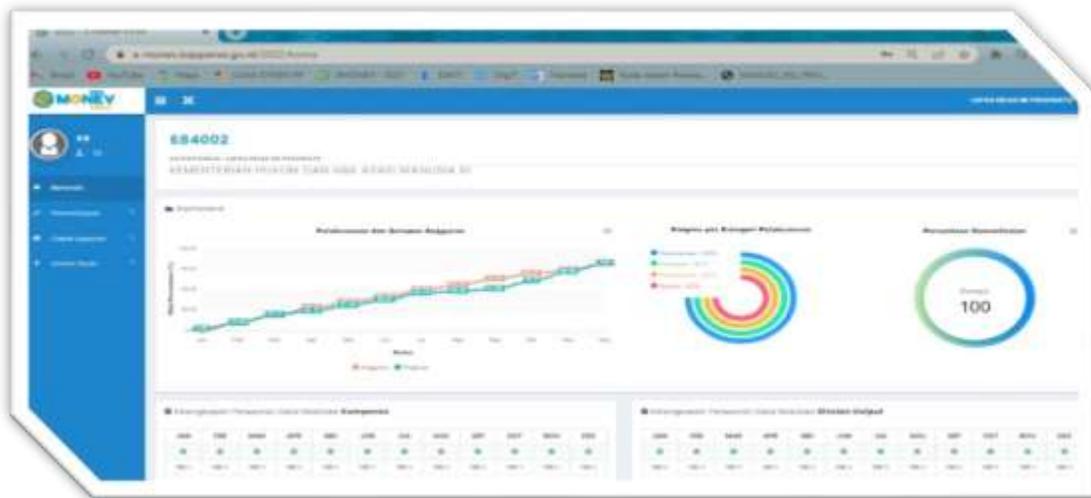
6. Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemasarakatan.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Pohuwato khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Memperkuat koordinasi antara Lembaga pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Ditjen Pemasarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan.
- Meningkatkan kapasitas SDM Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
- Meningkatkan alokasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pohuwato dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasarakatan
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan.
- Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasarakatan maupun terhadap petugas pemasarakatan.

LAMPIRAN



PERSENTASE CAPAIAN IKPA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO



MONEVPA | **Indikator Pelaksanaan Anggaran** | Filter: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	UNITS SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR INDIKATOR TOTAL/KONVERSI BOBOT
						REVISI DIPA	DEVIASI KUALITAS R/DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DIPENYAKI UPA				
1	180	013	004002	LAPAS KLAS IIB POHUWATO	N/A	100,00	94,96	100,00	100,00	100,00	98,74	100,00	100,00	96,27	100%	96,27
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	9,50	20,00	10,00	10,00	9,87	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	97,40				98,75		100,00				

Perbandingan PER 5/PM/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
 Satuan Kerja : 684002 LAPAS KELAS IIB PAHUWATO

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,194,252,000	0	9,115,033,339	-2,029,886,395	7,085,146,944	98.48 %	109,105,056
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,306,923,000	0	4,515,307,678	-2,229,113,045	2,286,194,633	99.10 %	20,728,367
WA Program Dukungan Manajemen	4,887,329,000	0	4,599,725,661	199,226,650	4,798,952,311	98.19 %	88,376,689

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684002 LAPAS KELAS IIB PAHUWATO

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,194,252,000	0	9,115,033,339	-2,029,886,395	7,085,146,944	98.48 %	109,105,056
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,306,923,000	0	4,515,307,678	-2,229,113,045	2,286,194,633	99.10 %	20,728,367
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	2,306,923,000	0	4,515,307,678	-2,229,113,045	2,286,194,633	99.10 %	20,728,367
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2,235,827,000	0	4,454,171,805	-2,238,930,845	2,215,240,960	99.08 %	20,586,040
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	123,472,000	0	117,405,653	5,892,000	123,297,653	99.86 %	174,347
051 Pembinaan Kepribadian	86,872,000	0	84,830,653	2,032,000	86,862,653	99.99 %	9,347
051.0C Kegiatan Kegamaan	38,475,000	0	38,475,000	0	38,475,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	665,000	0	665,000	0	665,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,960,000	0	13,960,000	0	13,960,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	100.00	0
051.0D Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	2,107,000	0	1,866,000	232,000	2,098,000	99.57 %	9,000
521211 Belanja Bahan	82,000	0	0	82,000	82,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,875,000	0	1,866,000	0	1,866,000	99.52 %	9,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	0	150,000	150,000	100.00	0
051.0E Kegiatan Kesenian dan Olahraga	46,290,000	0	44,489,653	1,800,000	46,289,653	100.00	347
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,840,000	0	27,839,653	0	27,839,653	100.00	347
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,450,000	0	16,650,000	1,800,000	18,450,000	100.00	0
052 Layanan Integrasi dan TPP	36,600,000	0	32,575,000	3,860,000	36,435,000	99.55 %	165,000
052.0A Sidang TIM Pengamat Pemasarakatan	8,660,000	0	7,710,000	950,000	8,660,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,560,000	0	3,510,000	50,000	3,560,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000	0	4,200,000	900,000	5,100,000	100.00	0
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMK dan CMB	27,940,000	0	24,865,000	2,910,000	27,775,000	99.41 %	165,000
521211 Belanja Bahan	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,930,000	0	17,455,000	2,310,000	19,765,000	99.17 %	165,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	3,900,000	600,000	4,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 684002 **LAPAS KELAS IIB PAHUWATO**

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2,026,180,000	0	4,250,591,152	-2,244,822,845	2,005,768,307	98.99 %	20,411,693
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,026,180,000	0	4,250,591,152	-2,244,822,845	2,005,768,307	98.99 %	20,411,693
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Masyarakat	1,821,200,000	0	4,054,531,652	-2,253,595,745	1,800,935,907	98.89 %	20,264,093
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,821,200,000	0	4,054,531,652	-2,253,595,745	1,800,935,907	98.89 %	20,264,093
005.0B Kebutuhan Sandang	48,800,000	0	48,800,000	0	48,800,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,800,000	0	48,800,000	0	48,800,000	100.00	0
005.0C Pemenuhan Sarana Makan	32,668,000	0	32,668,000	0	32,668,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,668,000	0	32,668,000	0	32,668,000	100.00	0
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	18,300,000	0	18,300,000	0	18,300,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,300,000	0	18,300,000	0	18,300,000	100.00	0
005.0E Extra Voeding	30,012,000	0	29,865,000	0	29,865,000	99.51 %	147,000
521211 Belanja Bahan	30,012,000	0	29,865,000	0	29,865,000	99.51 %	147,000
005.0F Pemulasaran	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	100.00	0
005.0G Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	23,888,000	0	20,507,700	3,380,300	23,888,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,248,000	0	8,957,700	290,300	9,248,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	14,640,000	0	11,550,000	3,090,000	14,640,000	100.00	0
005.0H Perlengkapan Medis Poliklinik	48,312,000	0	43,918,800	4,392,600	48,311,400	100.00	600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,312,000	0	43,918,800	4,392,600	48,311,400	100.00	600
BDC.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana	86,175,000	0	86,175,000	0	86,175,000	100.00	0
051 Perencanaan	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	100.00	0
052 Pelaksanaan	81,210,000	0	81,210,000	0	81,210,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	81,210,000	0	81,210,000	0	81,210,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	73,110,000	0	73,110,000	0	73,110,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

522151	Belanja Jasa Profesi	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	100.00	0
--------	----------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------	---

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 684002 **LAPAS KELAS IIB PAHUWATO**

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Evaluasi dan Pelaporan	3,045,000	0	3,045,000	0	3,045,000	100.00	0
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,045,000	0	3,045,000	0	3,045,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,045,000	0	3,045,000	0	3,045,000	100.00	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	71,096,000	0	61,135,873	9,817,800	70,953,673	99.80 %	142,327
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	71,096,000	0	61,135,873	9,817,800	70,953,673	99.80 %	142,327
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	35,806,000	0	29,063,000	6,742,800	35,805,800	100.00	200
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban	35,806,000	0	29,063,000	6,742,800	35,805,800	100.00	200
521211 Belanja Bahan	3,744,000	0	3,744,000	0	3,744,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	32,062,000	0	25,319,000	6,742,800	32,061,800	100.00	200
052 Pengawalan	35,290,000	0	32,072,873	3,075,000	35,147,873	99.60 %	142,127
052.0A Pengawalan Narapidana	19,450,000	0	16,375,000	3,075,000	19,450,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,000,000	0	3,775,000	225,000	4,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,450,000	0	12,600,000	2,850,000	15,450,000	100.00	0
052.0B Perpindahan (Mutasi) Narapidana	15,840,000	0	15,697,873	0	15,697,873	99.10 %	142,127
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,840,000	0	15,697,873	0	15,697,873	99.10 %	142,127
WA Program Dukungan Manajemen	4,887,329,000	0	4,599,725,661	199,226,650	4,798,952,311	98.19 %	88,376,689
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	4,887,329,000	0	4,599,725,661	199,226,650	4,798,952,311	98.19 %	88,376,689
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,707,529,000	0	4,446,873,790	172,508,550	4,619,382,340	98.13 %	88,146,660
EBA.956 Layanan BMN	11,681,000	0	9,919,900	1,760,000	11,679,900	99.99 %	1,100
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	10,920,000	0	9,159,900	1,760,000	10,919,900	100.00	100
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	10,920,000	0	9,159,900	1,760,000	10,919,900	100.00	100
521211 Belanja Bahan	4,160,000	0	2,399,900	1,760,000	4,159,900	100.00	100
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,960,000	0	4,960,000	0	4,960,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	761,000	0	760,000	0	760,000	99.87 %	1,000
052.0A Administrasi Pengadaan Barjas	761,000	0	760,000	0	760,000	99.87 %	1,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	761,000	0	760,000	0	760,000 99.87 %	1,000
--------	-------------------------------	---------	---	---------	---	-----------------	-------

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 684002 **LAPAS KELAS IIB PAHUWATO**

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
051 Penyediaan Informasi Publik	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
EBA.962 Layanan Umum	14,800,000	0	12,069,275	2,590,000	14,659,275	99.05 %	140,725
051 Urusan Umum	14,800,000	0	12,069,275	2,590,000	14,659,275	99.05 %	140,725
051.0A Urusan Umum	14,800,000	0	12,069,275	2,590,000	14,659,275	99.05 %	140,725
521211 Belanja Bahan	2,660,000	0	1,694,275	940,000	2,634,275	99.03 %	25,725
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,840,000	0	8,725,000	0	8,725,000	98.70 %	115,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,300,000	0	1,650,000	1,650,000	3,300,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,679,248,000	0	4,423,084,615	168,158,550	4,591,243,165	98.12 %	88,004,835
001 Gaji dan Tunjangan	3,655,398,000	0	3,529,110,713	38,566,391	3,567,677,104	97.60 %	87,720,896
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,647,658,000	0	3,521,485,713	38,566,391	3,560,052,104	97.60 %	87,605,896
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2,461,163,000	0	2,375,953,940	5,323,900	2,381,277,840	96.75 %	79,885,160
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	63,000	0	61,995	161	62,156	98.66 %	844
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	150,324,000	0	150,048,418	274,450	150,322,868	100.00	1,132
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	42,093,000	0	41,981,820	109,780	42,091,600	100.00	1,400
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	76,440,000	0	76,080,000	360,000	76,440,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	151,795,000	0	151,530,000	265,000	151,795,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1,702,000	0	1,701,100	0	1,701,100	99.95 %	900
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	172,867,000	0	172,504,440	362,100	172,866,540	100.00	460
511129 Belanja Uang Makan PNS	552,691,000	0	513,104,000	31,871,000	544,975,000	98.60 %	7,716,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	38,520,000	0	38,520,000	0	38,520,000	100.00	0
001.0B Uang Lembur	7,740,000	0	7,625,000	0	7,625,000	98.51 %	115,000
512211 Belanja Uang Lembur	7,740,000	0	7,625,000	0	7,625,000	98.51 %	115,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,023,850,000	0	893,973,902	129,592,159	1,023,566,061	99.97 %	283,939

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

002.0A Kesehatan Pegawai

10,000,000

0

9,865,100

0

9,865,100 98.65 %

134,900

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : 684002 **LAPAS KELAS IIB PAHUWATO**

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,000,000	0	9,865,100	0	9,865,100	98.65 %	134,900
002.0B Pakaian Dinas	74,100,000	0	74,099,000	0	74,099,000	100.00	1,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	74,100,000	0	74,099,000	0	74,099,000	100.00	1,000
002.0C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183,856,000	0	183,769,000	84,000	183,853,000	100.00	3,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183,856,000	0	183,769,000	84,000	183,853,000	100.00	3,000
002.0D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	41,895,000	0	31,922,178	9,931,500	41,853,678	99.90 %	41,322
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,895,000	0	31,922,178	9,931,500	41,853,678	99.90 %	41,322
002.0E Pemeliharaan Kendaraan	60,276,000	0	57,761,512	2,505,800	60,267,312	99.99 %	8,688
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60,276,000	0	57,761,512	2,505,800	60,267,312	99.99 %	8,688
002.0F Langganan Daya Dan Jasa	257,436,000	0	235,231,893	22,165,209	257,397,102	99.98 %	38,898
522111 Belanja Langganan Listrik	133,248,000	0	118,258,681	14,984,559	133,243,240	100.00	4,760
522112 Belanja Langganan Telepon	30,660,000	0	28,070,212	2,569,650	30,639,862	99.93 %	20,138
522113 Belanja Langganan Air	93,516,000	0	88,903,000	4,611,000	93,514,000	100.00	2,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000
002.0H Keperluan SehariHari Perkantoran	111,225,000	0	91,391,237	19,833,750	111,224,987	100.00	13
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	71,763,000	0	61,128,737	10,634,250	71,762,987	100.00	13
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,462,000	0	30,262,500	9,199,500	39,462,000	100.00	0
002.0I Konsultasi dan Koordinasi	105,512,000	0	52,994,500	52,506,000	105,500,500	99.99 %	11,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105,512,000	0	52,994,500	52,506,000	105,500,500	99.99 %	11,500
002.0J Jamuan Tamu	42,874,000	0	37,053,027	5,820,900	42,873,927	100.00	73
521211 Belanja Bahan	42,874,000	0	37,053,027	5,820,900	42,873,927	100.00	73
002.0K Honorarium Penanggung Jawab Keuangan	64,560,000	0	53,800,000	10,760,000	64,560,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	64,560,000	0	53,800,000	10,760,000	64,560,000	100.00	0
002.0L Penambah Daya Tahan Tubuh	54,750,000	0	48,765,000	5,985,000	54,750,000	100.00	0
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	54,750,000	0	48,765,000	5,985,000	54,750,000	100.00	0
002.0N Penanganan dan Pencegahan Covid-19	17,366,000	0	17,321,455	0	17,321,455	99.74 %	44,545

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,366,000	0	17,321,455	0	17,321,455 99.74 %	44,545
--------	---	------------	---	------------	---	--------------------	--------

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684002 LAPAS KELAS IIB PAHUWATO

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	74,500,000	0	74,400,000	0	74,400,000	99.87 %	100,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	74,500,000	0	74,400,000	0	74,400,000	99.87 %	100,000
051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50,800,000	0	50,700,000	0	50,700,000	99.80 %	100,000
051.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data	50,800,000	0	50,700,000	0	50,700,000	99.80 %	100,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,800,000	0	50,700,000	0	50,700,000	99.80 %	100,000
053 Peralatan Fasilitas Perkantoran	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	100.00	0
053.0A Peralatan Fasilitas Perkantoran	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	100.00	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	43,788,000	0	40,879,622	2,908,300	43,787,922	100.00	78
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	43,788,000	0	40,879,622	2,908,300	43,787,922	100.00	78
051 Pembinaan Kepegawaian	43,788,000	0	40,879,622	2,908,300	43,787,922	100.00	78
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai (FMD)	43,788,000	0	40,879,622	2,908,300	43,787,922	100.00	78
521211 Belanja Bahan	732,000	0	366,000	366,000	732,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,356,000	0	39,163,622	1,192,300	40,355,922	100.00	78
522151 Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0	1,350,000	1,350,000	2,700,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	61,512,000	0	37,572,249	23,809,800	61,382,049	99.79 %	129,951
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18,851,000	0	15,917,680	2,810,000	18,727,680	99.35 %	123,320
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	18,851,000	0	15,917,680	2,810,000	18,727,680	99.35 %	123,320
051.0A Penyusunan RKAKL	18,851,000	0	15,917,680	2,810,000	18,727,680	99.35 %	123,320
521211 Belanja Bahan	2,356,000	0	1,855,600	500,000	2,355,600	99.98 %	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,495,000	0	14,062,080	2,310,000	16,372,080	99.25 %	122,920
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19,980,000	0	7,173,371	12,800,000	19,973,371	99.97 %	6,629
051 Penyusunan Laporan Kinerja	19,980,000	0	7,173,371	12,800,000	19,973,371	99.97 %	6,629
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	19,980,000	0	7,173,371	12,800,000	19,973,371	99.97 %	6,629
521211 Belanja Bahan	390,000	0	0	390,000	390,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,390,000	0	6,273,371	12,110,000	18,383,371	99.96 %	6,629

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	900,000	300,000	1,200,000	100.00	0
--------	-------------------------------------	-----------	---	---------	---------	-----------	--------	---

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684002 LAPAS KELAS IIB PAHUWATO

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	11,180,000	0	6,220,000	4,960,000	11,180,000	100.00	0
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	11,180,000	0	6,220,000	4,960,000	11,180,000	100.00	0
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi	11,180,000	0	6,220,000	4,960,000	11,180,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,930,000	0	4,420,000	2,510,000	6,930,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	1,800,000	900,000	2,700,000	100.00	0
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	11,501,000	0	8,261,198	3,239,800	11,500,998	100.00	2
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	11,501,000	0	8,261,198	3,239,800	11,500,998	100.00	2
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	11,501,000	0	8,261,198	3,239,800	11,500,998	100.00	2
521211 Belanja Bahan	5,501,000	0	2,261,198	3,239,800	5,500,998	100.00	2
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Irman Jaya**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Hantor Situmorang**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Gorontalo



Hantor Situmorang

NIP. 19670317 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Pohuwato



Irman Jaya

NIP. 19730816 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

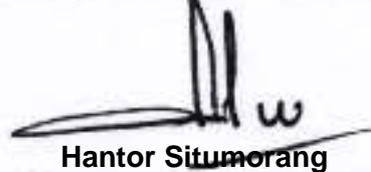
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%

	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	8 Unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	16 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.731.720.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.731.720.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.027.898.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.027.898.000,-

Gorontalo, 3 Januari 2023

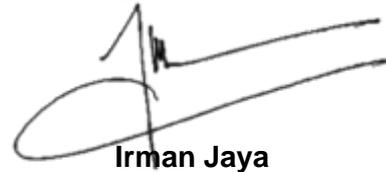
Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Gorontalo



Hantor Situmorang

NIP. 19670317 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas
IIB Pohuwato



Irman Jaya

NIP. 19730816 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POHUWATO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Irman Jaya**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Gorontalo, 3 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Pohuwato



Irman Jaya

NIP. 19730816 199603 1 001